



**KEPUTUSAN BERSAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

47 TAHUN 1997
NOMOR : -----
125 TAHUN 1997

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN
DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FISIK
PRASARANA ANTARA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung guna Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan di kedua Daerah, utamanya di wilayah perbatasan, telah ditetapkan Peraturan Bersama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kerjasama
12 Tahun 1994
di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dan sesuai hasil Rapat Koordinasi Perbatasan Jawa Barat-Lampung tahun 1995, sekaligus memberi arahan dan rumusan kebijaksanaan pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Fisik Prasarana antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 Jo. Undang-undang Nomor 3 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;

7. Peraturan Bersama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok
12 Tahun 1994
Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

8. Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor G/29/Bappeda/HK/1994 tentang 6 Tahun 1994
Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
9. Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 37 Tahun 1995 tentang G/547/Bappeda/HK/Tahun 1995
Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FISIK PRASARANA ANTARA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal 1

Menerima hasil pembahasan Rapat Koordinasi Perbatasan (RAKORTAS) Jawa Barat-Lampung Tahun 1997 yang tertuang dalam rumusan dan dokumen sebagai berikut:

- a. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Program Pembangunan Daerah Perbatasan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat-Lampung Tahun 1996/1997 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- b. Rencana Usulan Kesepakatan Kerjasama Program Pembangunan Daerah Perbatasan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat-Lampung Tahun 1998/1999 - 1999/2000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

- (1) Menindaklanjuti Peraturan Bersama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka dalam upaya memantapkan perencanaan perlu dilakukan Penyusunan Rencana Jangka Menengah (RJM) Daerah Perbatasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Pandeglang dan Lampung Selatan.
- (2) Rencana Jangka Menengah (RJM) Daerah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, disusun oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor G/29/Bappeda/HK/1994 tentang 6 Tahun 1994 Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung serta Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 37 Tahun 1995 tentang G/547/Bappeda/HK/Tahun 1995 Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 6

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandarlampung
pada tanggal 29 Agustus 1997

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

POEDJONO PRANYOTO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**



R. NURIANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 47 125 TAHUN 1997 TAHUN 1997

TENTANG : PELAKSANAAN KESEPAKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DIBIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN FISIK PRASARANA ANTAR PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT-LAMPUNG TAHUN 1996/1997

NO	Materi Kesepakatan	Tingkat Perkembangan	Permasalahan	Penjelasan		Rencana Tindak lanjut	Dinas/Instansi Yang Menangani	Keterangan
				Selesai	Belum Selesai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	BIDANG FISIK -----							
I.	SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEO FISIKA. PROGRAM POKOK. -----							
1.	Pembangunan Dermaga III. di Bakauheni	Pematangan/Penimbunan Lokasi.	Dana BLN OECF		sedang berjalant	Dilanjutkan TA. 1997/1998	Kanwil Perhubu- ngan.	TA. 1996/1997 Tidak dita- ngani

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PEKERJAAN UMUM ----- PROGRAM PENDUKUNG -----							
2.	Peningkatan Jalan & Jembatan. Tanjungkarang - Sim pang Terbanggi Besar	Masing berlanjut	-	-	sedang berjalan	Sesuai Program	Kanwil PU Dinas PU	TA. 1996/1997 25,75 KM.
3.	Pembangunan Jembatan Play Over -Natar. -Banjar Ratu.	Tahun Pertama Persiapan. Tahun Kedua Bertahap	Pembebasan tanah -	- -	Sedang berjalan Sedang berjalan	Dilanjutkan TA. 1997/1998	Kanwil PU Dinas PU Kanwil PU Dinas PU	TA. 1997/1998 TA. 1999/2000
4.	LINTAS BARAT. ----- Peningkatan Jalan -Tj.Karang-R.Tijang -K.Agung-Sanggi -Liwa-Krui-Bts.-Bengkulu.	Masih berlanjut Masih berlanjut Masih berlanjut	- - -	- - -	Sedang berjalan Sedang berjalan	Dilanjutkan TA. 1997/1998 Dilanjutkan 1997/1998 Dilanjutkan 1997/1998	Kanwil PU Dinas PU Kanwil PU Dinas PU Kanwil PU Dinas PU	1996/1997 17,50 KM 10,50 KM 20 KM.
5.	Pembangunan Jalan & Jembatan. Sanggi Bengkulu Bengkulu Utara LINTAS TIMUR. -----	Bertahap Kurang Dana Badan jalan belum tembus (masih berlanjut)	- - -	- - -	Sedang berjalan Sedang berjalan	Dilanjutkan 1997/1998 Dilanjutkan 1997/1998	Kanwil PU Dinas PU Kanwil PU Dinas PU	TA. 1996/1997 15,67 KM (Jln) 30 M (Jmbtn)
6.	Sukadana-Bj. Tenuk.		-	-	Sedang berjalan	Dilanjutkan 1997/1998	Kanwil PU Dinas PU	TA. 1996/1997 12 KM (Jln) 42 M (Jmbtn)
7.	Bj.Tenuk-Pmt.Panggang	Penyempurnaan geometris jalan (masih berlanjut)	-	-	Sedang berjalan	sda	Kanwil PU Dinas PU	TA. 1996/1997 23 KM.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Bakauheni-Ketapang-Labuhan Maringgai	Masih berlanjut	-	-	Sedang berjalan	sda	Kanwil PU Dinas PU	TA. 1996/1997 18,3 KM.
9.	Pembangunan Terminal Bus dan Truck di Bakauheni.	Belum ada tindak lanjut.	Dana APBN tidak disetujui Pusat	-	Sedang berjalan	Belum ada program.	Pemda Tk.I LLAJ.	Diserahkan Daerah+Swasta
10.	Pengembangan Fasilitas Jalan.	Sudah direalisasi	-	selesai	-	Program lanjutan untuk 1997/1998	Kanwil Perhubungan LLAJ.	TA. 1996/1997 Rambu IL 721 bh Pengamanan Jln 1.652 M.
11.	Pengembangan Prasarana KA. KP3 BAKA	Bertahap	-	-	Masih berlanjut	Dilanjutkan TA 1997/1998	Kanwil Perhubungan (Perumka)	TA. 1996/1997 Pembangunan Jalan KA 12.375 KM.
12.	Pemasangan Rambu	Belum ada tindak lanjut.	Perlu gagasan Lampung-Jabar	-	Belum	Belum ada program.	Kanwil Perhubungan LLAJ.	
II.	SEKTOR PARIWISATA.							
1.	PROGRAM POKOK. Paket Bersama & Promosi Selat Sunda.	Belum terrealisir	Perlu koordinasi program	-	Belum	Melalui kerja-sama IMS-GT	Kanwil Parpostel Diparda. Biro perjalanan sda.	
2.	Latihan Bersama Peningkatan SDM	Sedang dirancang oleh WTWC	Keterbatasan dana	-	Tahap persiapan	TWG (Tourisme Working Group)		
3.	Penanganan Perizinan bersama pada akses Pariwisata melalui penempatan personil pada lokasi : Labuhan Pdng. canti-Sertung.	Penanganan perizinan bersama antar Dinas Pariwisata, baru tahap pembicaraan Jawa Barat-Lampung.	Penanganan Perizinan masih dilakukan oleh masing-masing Kanwil Kehutanan Jabar-Lpg	-	Belum selesai	Perlu diusulkan Kembali TA.1998 /1999	Diparda Kanwil Kehutanan (Jabar-Lampung)	Penempatan personil dari BK SD II T.Karang sudah dilakukan kan di labuhan Pdng dan Pulau serutung namun batas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Pengadaan Sarana dan Fasilitas Wisata Jabar-Teluk Lampung.	Baru dilaksanakan di pulau serutung.	Belum diadakan nya study kegiatan ten- tang penem- pa- tan sarana dan fasilitas wi- sata secara me- nyeluruh di selat sunda.	-	Belum	Perlu diadakan study pengadaa- an sarana dan fasi	Diparda Parpostel Bappeda	
5.	Tukar Menukar Impor- masi Tentang Potensi Pariwisata Jabar-Lpg	Sudah dilaksanakan melalui tukar menukar booklead, leaplead	Masih terbatas nya bahan-ba- han promosi	-	Belum selesai	Dilanjutkan TA. 1997/1998	Diaprd a Parpostel.	
B.	BIDANG EKONOMI							
I.	SEKTOR PERTANIAN							
	SUBSEKTOR PERIKANAN							
	<u>PROGRAM PENDUKUNG</u>							
1.	Membangun/Meningkat- kan sarana/prasarana Pusat.	-Pengembangan PPI Lem- pasing (pengembangan dermaga, slip, way, fender dan rehab der- maga) sudah selesai dilaksanakan -Rehab dermaga PPI Kota Agung selesai dilaksanakan belum dilaksanakan	-Internsitas kegiatan ne- layan semakin meningkat. -Kapal tambat/ berlabuh sema- kin banyak	Sedang berjalan v		-Mengusulkan pe- ngembangan dan pembangunan sa- rana/prasarana PPI Alternatif -Peningkatan moni- toring dan penga- wasan.	Dinas Perikanan	
2.	Pembinaan terhadap nelayan musiman (andon).	-Secara periodik terus dilaksanakan	-	Sedang berjalan		-Perlu dirumuskan pola pembinaan nelayan andon		
3.	Temu usaha para pemi- lik Hatehery (pembe- nihan udang)	Belum dilaksanakan	-Tingkat morta- litas benur tinggi		v	-Perlu pertemuan antar sosialisasi pembenihan udang (APU).		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	<u>SEKTOR INDUSTRI</u> PROGRAM POKOK. -----							
1.	Merealisasikan Pasar Ber sama antara lain di- Tempat Istirahat/Rekreasi.	Belum sepenuhnya dilaksanakan.	Masih terbatas nya pemasaran hasil-hasil industri kecil & kerajinan.	-	Selesai	-Perlu diusulkan kembali.	-Kanwil/Dinas Perindustrian. -Diparda. -Kanwil Perhubungan.	
2.	Peningkatan kualitas Produksi Bahan Bangunan untuk memenuhi pasar di Jabar dan sekitarnya.	Belum sepenuhnya dilaksanakan.	Pemanfaatan potensi bahan bangunan bangunan galian C untuk bata/genting relatif kecil	-	Sudah berjalan	-Perlu diusulkan kembali.	-Kanwil/Dinas Perindustrian. -Dinas Pertambangan.	
B.	BIDANG SOSBUD. -----							
I.	<u>SEKTOR TENAGA KERJA</u> PROGRAM POKOK. -----							
1.	Penyuluhan Secara insentif terhadap perusahaan calon penerima tenaga kerja PJKTI dan calon tenaga kerja (prosedur AKAD)	-	Perusahaan - perusahaan di daerah Jabar dalam rekrut TK tidak melalui prosedur AKAD	-	V	-Koordinasi antar Kanwil Depnaker -Materi kesepakatan tetap dilanjutkan.	Kanwil Depnaker Lampung-Jabar	
2.	Koordinasi PTKD kedua Propinsi.	Telah dilaksanakan Penyusunan PTKD	PTKD belum jadi salah satu acuan pembangunan daerah	-	V	Perlu dana APBD	sda	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	<u>SEKTOR KESEHATAN</u> PROGRAM PENDUKUNG -----							
1.	Melengkapi peralatan UGD RSU Kalianda.	Sudah dilaksanakan dengan dana APBD I	Pelayanan RSU Perlu ditingkatkan.	Selesai	-	Harus dikembangkan.	Dinas/Kanwil Kesehatan Tk.I.	
2.	Peningkatan Puskesmas Bakauheni menjadi Puskesmas Perawatan.	Belum dilaksanakan	sda.	-	Belum selesai	Perlu diusulkan kembali.	sda.	
	<u>SEKTOR KAMTIBMAS.</u> PROGRAM POKOK. -----							
1.	Diteksi dini melalui percepatan informasi bagi Ex. Tahanan/Napi G.30 S/PKI sesuai Inmendagri No. 32/1981	Setiap ada permasalahan yang timbul telah dilakukan konsultasi langsung dengan Dit. Sospol Jabar melalui Rakor Kadit Sospol	Masih perlu lebih ditingkatkan lagi konsultasi dan koordinasi dgn Dit. Sospol	-	Terus berlanjut	Akan lebih ditingkatkan lagi konsultasi dan koordinasi dalam hal penanganannya.	Dit. Sospol Korem 043 Gatam Polda Lampung	
2.	Pencantuman code ET pada setiap KTP para Ex Tahanan G.30S/PKI	Se Indonesia yang dilaksanakan se tahun sekali di Jakarta oleh Dirjen Sospol	Jabar pada tahun mendatang.					

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

47 TAHUN 1997

NOMOR : 125 TAHUN 1997

TENTANG : PELAKSANAAN KESEPAKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DIBIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FISIK PRASARANA ANTAR PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

RENCANA USULAN KESEPAKATAN KERJASAMA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT-LAMPUNG TAHUN 1998/1999 - 1999/2000

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA					DINAS/INSTANSI YANG MENANGANI	KETERANGAN	
				APBN	APBD I	IPJK	INPRES DATI II	APBD II			LAIN LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
A.	BIDANG EKONOMI.										
I.	PERINDUSTRIAN										
1.	Pemasaran Industri	-Melaksanakan pame- ran di Lpg-Jabar -Koordinasi dlm pe- laksanaan Pengawa san yang ditunjang dg tukar menukar Informasi	Jabar		60.000	-	-	-	-	Dinas Perin- dustrian Tk.I Jawa Barat	1998/1999 1999/2000
2.	Pelatihan Industri Rumah Tangga	Studi Materi Latihan	Jabar		50.000					Dinas Perin- dustrian Tk.I Jawa Barat	1998/1999 1999/2000
3.	Pengembangan Dunia Usaha	-Pengembangan Pengo- lahan Produksi ekspor nonmigas -pengembangan Sentra Industri	Jabar		40.000					Dinas Perin- dustrian Tk.I Jawa Barat	1998/1999 1999/2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	<u>PERDAGANGAN</u>										
III	<u>PERIKANAN</u>										
1.	Rusaknya Trumbu Karang di Selat Sunda	Pengembangan Sarana Pasar.	Bakau-Heni. Merak.	PM	-	-	-	-	-	Kanwil/Dinas Perdagangan	1998/1999 1999/2000
		Trumbu karang buatan	T.Lampung T.Semangka P.Kalianda Krakatau Legundi Labuan- Pandeglang Binangun- Lebak	75.000							
B.	BIDANG SOSIAL BUDAYA										
I.	<u>KESEHATAN</u>										
1.	Sarana masih kurang pada RSU Serang dan RSU Kalianda.	-Penambahan Sarana RSU.	Serang Kalianda	-	50	-	-	-	-	Dinas Kesehatan Lpg-Jabar	1998/1999 1999/2000
2.	Pencegahan penyakit menular	Meningkatkan sarana prasarana KKP	Merak Bakauheni	200.000							
3.	Puskemas Merak, Bakauheni dan penengahan belum mampu melaksanakan perawatan.	Meningkatkan sarana dan prasarana Puskemas dengan tempat tidur yang memadai menjadi Puskemas Perawatan medis Pukesmas Merak dan Bakauheni & Penengahan dlm menangani kasus kasus kecelakaan/ memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat.	Serang Kalianda	630						Dinas Kesehatan TK. I dan Kanwil Depkes Jabar dan Lpg	1998/1999 1999/2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	<u>TENAGA KERJA</u>										
1.	Terbatasnya informasi pasar kerja s.d. ke tingkat desa dalam rangka pelaksanaan prosedur AKAD	Studi Pola Tertib Administrasi AKAD Jawa Barat-Lampung		100.000						Kanwil Depnaker dan Dinaker Jabar-Lampung	1998/1999 1999/2000
III	<u>KESEJAHTERAAN RAKYAT</u>										
1.	Banyak Tuna Sosial menjadi masalah di daerah.	Pemberdayaan Tuna Sosial	Jabar Lampung	-	50.000					Dinas Sosial Jabar-Lampung	1998/1999 1999/2000
IV.	<u>KAMTIBMAS.</u>										
1.	Masih Kurangnya informasi mengenai perpidahan eks Napi G.30 S PKI.	Pemantauan dan Pengawasan eks G.30 S PKI Jabar dan orang asing. larikan diri/tanpa melalui prosedur.	Lampung	-	PM					-Korem 043 Gatam. -Korem 064 -Dit. Sospol Lampung-Jabar	
2.	Masih Tingginya pencurian kayu dari Lpg.	Peningkatan koordinasi kerjasama keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengawasan bersama melalui THPT (Tim Pengawasan Hutan Terpadu)	Lampung Jabar	PM	-					-Korem 043 -Korem 064 -Polda Jabar-Lampung Kanwil Dephup Jabar-Lampung dan Instansi terkait.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	BIDANG FISIK -----										
I.	<u>PERHUBUNGAN</u>										
	TRANSPORTASI DARAT										
1.	- Makin Meningkatnya LHR pada lintas Tengah (th.94 41.056 menjadi 45.329 th.99). - Berfungsinya jalan Tol Jakarta-Merak. - Antisipasi Angkutan Lebaran pada arus Penyebrangan.	Percepatan pembangunan dermaga III IV di Merak dan Bakau Heni.	Bakau Heni Merak	PM					PM OECF	Kanwil Perhubungan Lampung - Jabar	T.A. 1998/1999 T.A. 1999/2000
2.	- Peningkatan LHR. - Mengantisipasi Kemacetan angkutan lebaran.	Peningkatan Kapasitas (Pelebaran) Jalan Merak-Pintu Tol Panjang 3 Km.	Bakau Heni Merak	PM						Kanwil PU Jabar	T.A. 1998/1999
3.	Peningkatan Penyebrangan Barang.	Pengembangan lapangan parkir terminal truk di pelabuhan Merak dan Bakau Heni.	Bakau Heni Merak	1.000.000						Kanwil Perhubungan Lampung - Jabar	T.A. 1998/1999 T.A. 1999/2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	<u>PARIWISATA</u>										
1.	Kerjasama Promosi me melalui TIC.	-Perlu diadakan pem buatan TIC. -Penempatan personil yang berlokasi di Merak & Bakauheni	Jabar Lampung		100.000 000	-	-	-	-	Diparda lpg dan Jabar	1998/1999 1999/2000
2.	Belum dikembangkan- nya potensi pariwisata ta di Selat Sunda	Study bersama penem patan sarana dan fa silitas wisata di- Selat Sunda guna la yak kunjungan bagi Wisatawan.	Jabar Lampung		75.000 000	-	-	-	-	Diparda dan Bappeda Ja- bar Lampung	1998/1999 1999/2000


POEDJONO PRANYOTO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Bandar Lampung,²⁹ Agustus 1997
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

